

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN PADA KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

Amiruddin¹, Rahmat Rustin²

¹Program Studi Administrasi Negara, IISIP YAPIS Biak

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Masalah kemiskinan adalah masalah yang dialami hampir setiap negara di dunia ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Penyaluran Program Beras Miskin Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar. Jenis penelitian penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian adalah survey. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa implementasi program RASKIN di Kecamatan Manggala Kota Makassar apabila diukur dengan menggunakan indikator prinsip pelaksanaan program dan indikator mekanisme distribusi maka secara umum dapat dikategorikan berjalan kurang baik.

Kata Kunci: *Implementasi, Program Beras Miskin, Kelurahan.*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan itu sangat kompleks yang terlihat dari permasalahan yang melekat pada penduduk miskin itu sendiri. Karena kemiskinan merupakan kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu kondisi ini juga dapat berupa ketidakberuntungan yang melilit keluarga miskin itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan bersifat multidimensional dan untuk mengentaskannya diperlukan upaya-upaya yang bersifat multisektoral dengan memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah ada. Salah satu bentuk kebijakan yang

diterapkan berupa kebijakan subsidi pangan terarah (*targeted food subsidy*) berupa transfer pendapatan (*income transfer*) dalam bentuk barang masih sangat diperlukan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin yang tetap tidak menunjukkan perbaikan perekonomian dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat guna pengentasan kemiskinan adalah melalui program beras untuk keluarga miskin (RASKIN). Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui pelaksanaan program tersebut

yang didukung oleh program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Dengan demikian RASKIN merupakan program transfer energi yang dapat mendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan produktifitas keluarga miskin. Perencanaan dan pengelolaan RASKIN mulai dari pusat sampai pada tahap penyaluran dan pembagian beras kepada penerima manfaat / keluarga miskin diikuti dengan berbagai kebijakan tentang pelaksanaan secara teknis dilapangan sehingga bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat penerima bantuan.

Kurun waktu (2006-2010) program RASKIN telah terlaksana selama tiga tahun dengan terus memberikan evaluasi dari pelaksanaan program ini. Meskipun secara nyata kondisi masyarakat miskin masih saja bekerja sesuai pola-pola tradisional yang selama ini ada dan terbina dalam lingkungannya. Ancok (1995) menyatakan bahwa peluang untuk sukses dalam pengentasan kemiskinan akan lebih besar bila kaum miskin diberi peluang yang lebih besar untuk mengurus dirinya

sendiri, mempengaruhi keputusan, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempengaruhi kemampuan dan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kota Makassar. Salah satu kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan RASKIN adalah Kecamatan Manggala. Dengan kondisi masyarakat yang prural dengan penduduk asli yang dominan dengan berada pada garis kemiskinan, menarik untuk diangkat menjadi topik penelitian dengan judul “ *Implementasi Penyaluran Program Beras Miskin Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar*”.

KAJIAN PUSTAKA

Macmanian dan Sabatier dalam Wahab (1990) melihat bahwa implementasi sebagai usaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program diberlakukan atau dirumuskan. Dengan kata lain yakni sebagai peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan, baik yang menyangkut usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dalam masyarakat. Hinggians dalam Salusu (2006) menyebutkan bahwa implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan dalam mana sumber daya manusia

menggunakan sumberdaya lain yang menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan lini paling bawah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Dunn (1998) yang membagi evaluasi dalam dua bagian, pertama, secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisa hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Adapun Shubert (dalam Poli;1998) menyebutkan bahwa *poverty is often defined as either absolute or relative. Absolute poverty defined as a lack of a substance level of food. Relative poverty defined as some unsatisfied basic needs or income below a relative poverty in based on some minimum basket of food, food on service.* Kemiskinan sosial diartikan sebagai lemahnya jaringan sosial dan struktur sosial yang kurang mendukung serta terbatasnya akses bagi seseorang untuk meningkatkan sumber daya yang ada. (Effendi:1993). Dimensi kemiskinan ini mencerminkan bagaimana suatu masyarakat tidak mampu memberikan cerminan yang baik kepada anggota keluarganya maupun dirinya sendiri khususnya yang terkait dengan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemiskinan politik yaitu ketidakberdayaan atau ketidakmampuan politik suatu kelompok, atau golongan masyarakat dalam mempengaruhi proses alokasi sumber daya. Selain itu terdapat kemiskinan struktural. Nasution (1991) menyebutkan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tatanan kelembagaan, dalam arti kelembagaan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup aturan permainan yang ditetapkan.

Sementara itu Soemardjan (1980) melihat bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia pada mereka. Dalam konteks ini para ahli ingin mempertegas bahwa penyebab kemiskinan pada dasarnya juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau bahkan kesempatan kepada anggota masyarakat dalam memanfaatkan sumber-sumber yang ada dalam lingkungannya. Sayogyo dalam Nugroho (1995) lebih cenderung menggunakan ukuran garis kemiskinan dengan pendekatan kemiskinan absolut. Cara yang dikembangkan ialah memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan kebutuhan besar

perorang pertahun. Ada tiga golongan orang miskin yaitu golongan paling miskin (pm), golongan miskin sekali (ms), golongan miskin (m).

Program RASKIN adalah program yang dilaksanakan berdasarkan SK Bersama Antara mendagri dengan Dirut Perum Bulog No 25. Th 2009 dan No. PPK-12/07/2009 Tentang pelaksanaan Program RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan dengan memberikan priotitas kepada masyarakat miskin dalam upaya memenuhi kebutuhan pokoknya. Tujuan RASKIN bidang pangan adalah untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bantuan beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga dan jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah Kota Makassar dengan Fokus pada Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar. Adapun Waktu penelitian yaitu Pada Bulan Februari sampai maret 2015. Jenis penelitian penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian adalah survey. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-

keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.

Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah aparat pelaksana program pada tingkat Kelurahan Antang dan masyarakat miskin penerima bantuan Raskin yang ada dalam wilayah Kelurahan Antang sebanyak 25.773 orang dengan jumlah sebesar 5.710 Kepala Keluarga Kepala Keluarga. Karena besarnya populasi penelitian, maka teknik penarikan sample dilaksanakan dengan :

- a) Untuk aparat pemerintah Kelurahan Antang dan Satuan Tugas (Satgas) dilaksanakan dengan teknik sampling jenuh dimana semua aparat pelaksana program dari tingkat kelurahan sampai titik distribusi menjadi responden yaitu 27 orang,
- b) Untuk masyarakat dilaksanakan menggunakan Sampling Jenuh yaitu dengan memilih semua penerima raskin di kelurahan Antang sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK).

Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian dan rumusan masalah yang telah diterangkan pada bab sebelumnya maka metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis diskriptif Kualitatif menggunakan tabel frekuensi

maupun tanpa menggunakan tabel frekuensi. Jika frekuensi dinyatakan dalam tabel persentase terhadap total frekuensi maka tabel tersebut dinamakan tabel frekuensi relatif. (Nasir, 1999). Selain itu juga dilaksanakan tabulasi silang yang merupakan perhitungan dari data primer yang telah dikumpulkan. Selanjutnya dibuat kategori penilaian dan skoring kategori pengukuran variabel, didasarkan pada nilai kemampuan masing-masing dengan menggunakan skala likert (Sugiyono : 2006):

1. Tidak baik dengan nilai skor : 1
2. Kurang baik dengan nilai skor : 2
3. Baik dengan nilai skor : 3
4. Sangat baik dengan nilai skor : 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin

Dalam melaksanakan program RASKIN yang terkoordinasikan dari pusat, aparat pemerintah kecamatan melalui pemerintah kelurahan berupaya melaksanakan implementasi program ini sampai pada titik distribusi akhir dengan memperhatikan berbagai acuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dari pusat.

Penentuan satgas dilapangan sepenuhnya diberikan tanggung jawab kepada lurah sebagai penanggungjawab

program ini pada tingkat kelurahan. Sejak dilaksanakan pada Tahun 2013 sampai sekarang, untuk wilayah Kecamatan Manggala senantiasa berupaya untuk melaksanakan agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa berbagai aturan main yang telah ditetapkan dalam program ini mudah untuk ditelaah dan selanjutnya di terapkan dilapangan. Hanya saja yang terus diperhatikan adalah upaya untuk memenuhi pemerataan dan keadilan sehingga masyarakat penerima manfaat tidak serta merta menganggap dianaktirikan dalam program ini karena tidak tersentuh oleh program ini.

1. Tangapan Responden Tentang Keikutsertaan Keluarga Miskin dalam Musyawarah Kelurahan Dalam Penetapan Keluarga Penerima Program RASKIN.

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Sangat Sering	-	-
Sering	15	11,81
Jarang	29	22,83
Tidak Pernah	83	65,36
Jumlah	127	100%

Hasil Olahan Kuesioner Februari 2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam musyawarah penetapan keluarga penerima manfaat dari program beras untuk keluarga miskin terlihat bahwa sebagian besar responden menjawab

bahwa mereka tidak pernah ikut dalam musyawarah penerima program ini. Hal ini dibuktikan dari persentase jawaban responden yaitu 65,36% yang menjawab tidak pernah. Dengan rata-rata skor 1,46 skala rendah menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penentuan keluarga sasaran penerima program tidak diperhatikan oleh pengelola program. Sementara jawaban sering dan jarang lebih dipilih oleh aparat pelaksana pada tingkat kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penanggung jawab program pada tingkat kelurahan disebutkan bahwa dalam penentuan keluarga penerima sasaran program data-data yang diambil adalah berasal data yang ada pada BKKBN tentang jumlah masyarakat miskin yang ada dalam suatu wilayah. Penetapan keluarga sasaran penerima manfaat ditetapkan tanpa melalui musyawarah karena alasan dana dan keterbatasan waktu dalam penentuan alokasi yang telah ditetapkan dari pusat.

2. Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan Aparat Pemerintah Kecamatan Dalam Penentuan Pagu Alokasi Penerima Program.

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Sangat Terlibat	-	-
Terlibat	-	-
Kurang Terlibat	7	18,92

Tidak Terlibat	30	81,08
Jumlah	37	100 %

Hasil Olahan Kuesioner Maret 2015

Tabel 2 memperlihatkan bahwa dari 37 orang responden dari aparat pemerintah menunjukkan tidak ada yang menjawab sangat terlibat dan terlibat. 7 orang atau 18,92 % menjawab kurang terlibat dan 30 orang atau 81,08 % menjawab tidak terlibat. Dengan rata-rata skor 1,19 kategori tidak terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penentuan lokasi penerima manfaat program Beras untuk keluarga miskin aparat pemerintah dari kelurahan sampai pada kecamatan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan didalamnya.

Pemerintah kecamatan hanya akan menerima besarnya jumlah beras yang telah alokasikan untuk wilayahnya dan selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat melalui titik-titik distribusi sebagaimana jumlah keluarga miskin yang telah ditetapkan dan berhak menerima manfaat dari program yang akan dijalankan.

Alokasi dalam suatu wilayah tidak didasarkan pada jumlah keluarga miskin dalam wilayah tersebut. Sehingga secara umum disebutkan bahwa pagu alokasi yang akan diterima oleh masyarakat merupakan ketetapan yang telah ditetapkan dari pusat sebagai

program yang pengalihan subsidi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin

Dalam pelaksanaan program Beras untuk keluarga miskin tentunya tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan yang sedikit banyak akan memberikan pengaruh kepada tahap implementasi program tersebut. Sebagai program dengan tingkat pembiayaan yang tinggi, program ini memerlukan sumber-sumber dana yang secara langsung dapat menopang pelaksanaan dari kegiatan ini. Karena disadari bahwa sebagai kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kegiatan ini memerlukan dana yang relatif besar.

Begitupula halnya dengan kondisi masyarakat yang harus paham dan sadar bahwa sebagai target dari program ini, masyarakat harusnya mengetahui langkah-langkah yang harus mereka laksanakan dan dapat merubah pola hidupnya ke yang lebih baik dan terutama adalah bagaimana aparat pelaksana program mampu menjalankan berbagai konsep dan petunjuk sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Ketersediaan Anggaran Di Pemerintah Kabupaten

Sebagai program yang diimplementasikan ke kabupaten/kecamatan, setidaknya aparat pemerintah kabupaten harus menyiapkan dana khusus yang dianggarkan dalam menunjang pelaksanaan program ini. Hal ini penting karena Perum Bulog sebagai instansi yang terkait langsung dengan program ini hanya memberikan tanggungan sampai pada tingkat penyaluran dan bukan pada titik distribusi rumah tangga.

Berbagai biaya yang muncul sebagai dampak dari pelaksanaan program ini tentunya harus mendapat perhatian dari aparat pemerintah kabupaten. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program pada tingkat kabupaten disebutkan bahwa kesediaan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana yang cukup dalam menunjang implementasi program ini merupakan bentuk partisipasi langsung dan keinginan aparat dalam menunjang terlaksananya kegiatan ini.

Dana yang disiapkan tersebut terutama dalam hal kegiatan yang membutuhkan waktu yang relatif dan dengan sendirinya akan membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah sampai

sejauhmana dana tersebut dapat benar-benar sampai pada pelaksanaan kegiatan.

Bentuk perhatian perhatian yang dimaksudkan adalah adanya anggaran khusus yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan beras untuk keluarga miskin. Dana tersebut seharusnya dialokasikan melalui APBD yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dengan perhatian tersebut diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan terutama dengan tidak adanya lagi perubahan pagu alokasi beras yang seharusnya dalam bilangan kilogram keliter.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya kurangnya biaya yang dialokasikan untuk kegiatan ini secara langsung memberikan dampak kepada pengelolaan program. Hal ini terjadi pada titik distribusi yang sangat mengharapakan adanya suntikan dana segar sehingga bukan lagi mereka yang berupaya untuk mendapatkan berbagai tambahan dana guna menutupi kekurangan akibat tidak sampainya beras pada titik distribusi dimana beras tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat.

2. Budaya Masyarakat

Faktor selanjutnya yang secara langsung dapat memberikan pengaruh pada pelaksanaan program ini adalah

budaya yang dianut masyarakat. Hal ini menjadi sorotan karena meski bagaimanapun bantuan yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, jika kesadaran dari masyarakat miskin itu sendiri tidak ada, maka akan sangat sulit untuk merubah pola hidup masyarakat itu sendiri. Hal ini terkait dengan pandangan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai suatu hal yang tidak hanya dapat ditinjau dari satu sisi saja, akan tetapi kemiskinan merupakan suatu hal yang datangnya multidimensi sehingga kegiatan terkecil dari masyarakat tersebut akan memberikan dampak pada berbagai kegiatannya.

Budaya masyarakat di Kecamatan Manggala jika dikaitkan dengan pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin memberikan gambaran yang sangat jelas tentang pola dan pandangan hidup masyarakat. Hal ini penting karena meskipun beras sebagai kebutuhan pokok dapat memberikan keringanan pada pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah bahwa alokasi dana yang disubsidi dengan jumlah yang tidak terlalu besar ternyata tidak memberikan pengaruh yang sangat besar pada pola hidup masyarakat. Apalagi hal tersebut sifatnya bukan merupakan tambahan biaya

penghidupan yang layak yang secara langsung memberikan dampak pada pola hidup masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa bantuan tersebut merupakan kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang sifatnya beras murah.

3. Sumberdaya Aparat Pelaksana Program

Dalam melaksanakan program, diperlukan adanya aparat yang mampu membaca dan mengimplementasikan berbagai petunjuk yang ada dalam program sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Aparat pelaksana program sebagai tulang punggung dalam pelaksanaan program memegang kunci penting atas keberhasilan program tertentu.

Berhasil tidaknya suatu program akan sangat ditentukan oleh orang-orang yang melaksanakan program tersebut. Salah seorang penanggungjawab pelaksanaan program pada tingkat kelurahan menyatakan bahwa untuk program Raskin Aparat harus mampu menyelaraskan antara pemahaman mereka akan program dengan kondisi lapangan, sehingga apa yang seharusnya menjadi kebutuhan masyarakat disuatu lokasi dapat terpenuhi dengan baik berkat kebijakan seorang aparat pelaksana.

Kondisi jelas menunjukkan bahwa diperlukan pengetahuan dan

keterampilan khusus bagi seorang aparat dalam mengelola dan melaksanakan aktifitasnya dalam kegiatan program. Aparat yang tahu dengan jelas makna dan tujuan dari program akan bertindak efektif sesuai dengan rambu-rambu program yang telah ditetapkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan pengalaman seorang akan mampu menyelesaikan tugasnya lebih baik dari mereka yang memiliki pendidikan formal lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian hasil-hasil penelitian dan pembahasan maka dalam penulisan karya ilmiah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Implementasi program RASKIN di Kecamatan Manggala Kota Makassar apabila diukur dengan menggunakan indikator prinsip pelaksanaan program dan indikator mekanisme distribusi maka secara umum dapat dikategorikan berjalan kurang baik. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi program adalah;kurangnya perhatian pemerintah kabupaten dalam mengalokasikan dana pada pelaksanaan program ini sehingga dikategorikan sebagai penghambat pelaksanaan program begitu pula halnya dengan budaya masyarakat miskin yang tidak melihat program ini sebagai suatu hal yang dapat

memotivasi mereka dalam meningkatkan kinerjanya.

SARAN

Sebagai hasil temuan dari penelitian ini yakni ditemukannya berbagai kelemahan-kelemahan dalam implementasi program RASKIN, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pelaksanaan program dimasa yang akan datang, maka berbagai prinsip pelaksanaan program terutama yang menyangkut transparansi, dan skala prioritas pada mereka yang benar-benar memerlukan program ini.
2. Dalam indikator kinerja para pelaksana pada titik distribusi benar-benar memperhatikan indikator yang digunakan sehingga sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1999, Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, Sinar Grafika, Jakarta.

Arikunto, S. 2006. *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Badan Urusan Logistik, 2008, *Pedoman Umum (PEDUM) Program Kompensasi Subsidi BBM Bidang Pangan*, Jakarta Bulog.

Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan perkembangan pemikiran, dan praktiknya di Indonesia*. LP3ES, Jakarta.

Melong, L.J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nazir Mohammad, 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nasution, Lutfi. 1991. *Taksonomi Kemiskinan di Indonesia Suatu Kajian Eksploratif. Makalah Semiloka Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. IPB Bogor.

Nugroho. H.(ed). 1995, *kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta.

Poli.Win. 1993. *Mengatur Diskusi ESEI Cabang Ujung Pandang Tentang kemiskinan, Ujung Pandang*.

Rahardjo D. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya media Yogyakarta.